

## **BAB 6**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Sesuai tujuan penelitian, kesimpulan dari hasil penelitian dapat dirangkum sebagai berikut:

##### **6.1.1. Implementasi MBS di SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi dan SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi.**

Secara umum para aktor pelaksanaan di SDN Cempaka putih Timur 05 Pagi mendukung terkait dengan diterapkannya kebijakan MBS. Namun pada tataran implementasi MBS belum berjalan dengan baik. hal itu disebabkan oleh beberapa hal antara lain: kurangnya sosialisasi dan pembinaan terkait dengan petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan MBS itu sendiri, kurangnya dukungan sumberdaya yang memadai, dan kurangnya dukungan dari masyarakat.

Implementasi MBS di SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi, sudah berjalan cukup baik. Tingkat pemahaman para aktor pelaksana di SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi sudah lebih baik dari pada SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi, hal itu disebabkan karena para aktor pelaksana di SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi lebih proaktif dalam menggali informasi tanpa harus menunggu datangnya arahan atau informasi dari luar, sumberdaya yang dimiliki juga sudah cukup memadai, para aktor sangat mendukung terhadap pelaksanaan MBS, dan memperoleh dukungan penuh dari masyarakat (orang tua murid). Dengan demikian demikian secara keseluruhan implementasi MBS di SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi sudah lebih baik dari pada SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi. Secara umum para aktor di SDN Cempaka putih Timur 05 Pagi mendukung terkait dengan diterapkannya kebijakan MBS. Namun pada tataran implementasi MBS belum berjalan dengan baik, hal itu disebabkan oleh beberapa hal antara lain: kurangnya sosialisasi dan pembinaan terkait dengan petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan MB, kurangnya dukungan sumberdaya yang memadai.

Implementasi MBS di SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi sudah berjalan cukup baik. Tingkat pemahaman para aktor pelaksana di SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi sudah lebih baik dari pada SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi, hal itu disebabkan karena para aktor pelaksana di SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi lebih proaktif dalam menggali informasi tanpa harus menunggu datangnya arahan atau informasi dari luar, sumberdaya yang dimiliki juga sudah cukup memadai, para aktor sangat mendukung terhadap pelaksanaan MBS, dan memperoleh dukungan penuh dari masyarakat (orang tua murid).

#### 6.1.2. **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi MBS di SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi dan SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi.**

Faktor pendukung implementasi MBS di SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi adalah adanya transparansi yang dibangun dengan baik, adanya dukungan dari guru, orang tua murid, dan Komite Sekolah. Sedangkan yang menjadi penghambat terhadap pelaksanaan MBS di SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi adalah kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan MBS, kurangnya kesiapan sumberdaya yang dimiliki, belum adanya kewenangan penuh terhadap pengelolaan sumberdaya, sarana-prasarana yang kurang memadai, dan sikap yang pasif dari aktor pelaksana MBS.

Faktor pendukung implementasi MBS di SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi antara lain: transparansi sudah dibangun dengan baik, sudah didukung dengan adanya lingkungan sekolah yang kondusif, sumberdaya yang cukup memadai, baik itu sarana prasarana (*facility*), SDM maupun sumberdana (*financial*), dan dukungan maupun suport yang tinggi dari masyarakat (orang tua murid). Sedangkan yang menjadi penghambatnya antara lain: kurangnya sosialisasi, kurangnya pembinaan dari struktur birokrasi yang membawahi SD tersebut, dan kurangnya otonomi dalam mengelola sumberdaya sekolah terutama pengelolaan dana.

### 6.1.3. **Peran Komite Sekolah di SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi dan SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi.**

Komite Sekolah (di kedua satuan pendidikan) sebagai mitra kerja sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan belum sepenuhnya menjalankan tugas, peran, dan fungsinya dengan baik. Hal itu juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap komite sekolah.

Komite Sekolah di SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi maupun SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi belum menjalin hubungan kerjasama dengan masyarakat di luar sekolah maupun dunia usaha/dunia industri untuk mendukung program sekolah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Peran komite selama ini yang berjalan baru sebatas (*controlling agency*) atau peran kontrol terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Sementara untuk tugas, peran dan fungsi yang lain belum mampu dilaksanakan secara maksimal.

Dibandingkan dengan Komite Sekolah SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi, secara khusus Komite Sekolah di SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi sudah memberikan suporting yang lebih maksimal. Baik itu suporting finansial, pemikiran maupun tenaga terhadap sekolah. Komite Sekolah SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi juga lebih aktif dalam memberikan dorongan atau motivasi terhadap orang tua murid dalam pelaksanaan program pendidikan.

### 6.1.4. **Perbedaan Implementasi MBS antara SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi dengan SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi**

Dari beberapa kesimpulan tersebut di atas jelas terdapat perbedaan terhadap implementasi kebijakan MBS antara SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi dengan SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi.

Implementasi MBS di SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi, kurang didukung dengan sumberdaya yang memadai, dan kurang didukung dengan partisipasi masyarakat. Dengan demikian pelaksanaan MBS di SDN Cempaka Putih Timur 05 Pagi belum didukung dengan prasyarat utama agar pelaksanaan MBS berjalan dengan baik.

Implementasi MBS di SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi sudah didukung dengan SDM, sumber dana dan sarana prasarana yang memadai, didukung dengan kondisi lingkungan yang kondusif, dan didukung dengan partisipasi masyarakat (orang tua murid). Dengan demikian pelaksanaan MBS di SDSN Cempaka Putih Barat 05 Pagi sudah didukung dengan prasyarat utama agar pelaksanaan MBS berjalan dengan sukses.

## 6.2. Saran-saran

Dengan memperhatikan hasil penelitian pada dua satuan pendidikan dasar tersebut dapat peneliti sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada para aktor implementasi (Kepala Sekolah, Guru, dan Komite Sekolah) agar lebih ditingkatkan serta diberikan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang lebih operasional dan praktis agar para aktor implementasi mendapatkan kejelasan dalam menjalankan tugas, peran, dan fungsinya.
2. Sekolah agar diberikan kewenangan penuh untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki dan dibutuhkan. Dengan demikian sekolah memiliki keleluasaan dalam membuat perencanaan terhadap pengelolaan sumberdaya berdasarkan kebutuhan lokal, terutama pengelolaan dana.
3. Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Cempaka Putih bersama Pengawas Satuan Pendidikan agar lebih meningkatkan pengawasan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan MBS, terutama tentang Komite Sekolah agar tata cara pembentukan, tugas, peran, dan fungsi komite sekolah terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Hubungan pihak sekolah dengan masyarakat hendaknya perlu diperluas dan tingkatkan, artinya hubungan tidak hanya dengan orang tua murid akan tetapi harus diperluas dengan masyarakat di luar sekolah seperti pihak swasta atau dunia usaha/dunia industri. Hal ini belum terlaksana, maka pemerintah terutama Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Pusat memberikan pelatihan kepada para Kepala SD dan Komite Sekolah.

5. Hendaknya pemerintah melakukan reformasi UU atau aturan-aturan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan agar tidak menimbulkan multi interpretasi oleh para aktor implementasi MBS.

